

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat menjadi bagian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan dalam hal memakmurkan ekonomi negara atau daerah agar kesejahteraan penduduk dapat tercapai. Berdasarkan sudut pandang ekonomi, seseorang yang masuk dalam kategori Sejahtera adalah pendapatan dan kekayaannya yang berlimpah. Dari sudut pandang ekonomi syariah, kesejahteraan tujuannya untuk mencapai sejahteranya manusia baik dari kesejahteraan material, spiritual, dan moral. Konsep kesejahteraan ini tidak hanya memanifestasikan pada nilai ekonomi, tetapi nilai spiritual dan moral masuk didalamnya.¹

Secara umum Pembangunan yang merujuk pada kesejahteraan ekonomi akan tercapai dengan dibutuhkannya usaha antara pemerintah dan masyarakat. Konsep dari pembangunan adalah kondisi dari aspek kehidupan negara saat ini membawa dampak untuk kehidupan masyarakat jauh lebih baik dimasa yang akan datang. Permasalahan terkait keterbelakangan ekonomi di suatu negara dipengaruhi oleh produktivitas atau efisiensi tenaga buruh yang masih rendah dibandingkan dengan dengan negara maju. Hal ini dapat terjadi karena adanya kemiskinan yang dapat terlihat dari buta huruf, rendahnya pendidikan, dan mobilitas pekerjaan, standar gizi yang belum mencapai kuantum, serta kesehatan yang buruk.²

Kemiskinan menjadi isu dalam pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan menjadi masalah terbesar di setiap negara.³ Kemiskinan dipahami sebagai kurangnya uang maupun barang untuk melangsungkan hidup.

Kemiskinan pada sudut pandang Islam tidak hanya melihat dari ketidakmampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya baik pokok maupun non pokok, akan tetapi

¹ Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam", (Banten: Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village Tangerang, 2021).

² Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta : Pranamedia Group, 2015).

³ Sulastomo, *Sistem Jaminan Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi*, (Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.14

Islam melihat kemiskinan menjadi masalah kultural dari seseorang yang berperilaku buruk seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Miskin juga dapat diartikan sebagai miskin dalam hal keagamaan duniawi dan akhirat.⁴ Islam sangat memperhatikan ekonomi yang menjadi pondasi berkehidupan dalam keluarga, Islam juga memberikan arahan untuk kebaikan dan kesejahteraan dapat tercapai. Sesungguhnya Allah SWT memberikan anjuran untuk umatnya terlepas dari kemiskinan tujuannya agar mampu mencapai kesejahteraan dengan bekerja.

Kemiskinan juga menjadi permasalahan global karena setiap negara pasti memiliki masyarakat yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan, begitu pula dengan di Indonesia yang menjadi fokus utama pemerintah. Masyarakat yang masuk kategori di bawah garis kemiskinan apabila pendapatannya tidak mampu memenuhi hak dasarnya berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, lingkungan, air bersih, dan sumber daya alam.⁵

Indonesia yang merupakan negara berkembang, masih mengupayakan cara untuk mengentaskan kemiskinan, tujuannya agar masyarakat hidup dalam kesejahteraan. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah garis kemiskinan (Rupiah/Daerah/Bulan) di Indonesia menurut daerah. Garis kemiskinan bulan maret tahun 2022 di kota sebesar Rp. 521.494, dan nilainya lebih rendah dibandingkan dengan bulan maret tahun 2023 sebesar Rp.569.299. Sedangkan di desa Rp.484.209 naik menjadi Rp.525.050 di bulan maret tahun 2023. Jumlah garis kemiskinan kota ditambah dengan desa sebesar Rp.505.469 di bulan maret 2022 dan sebesar Rp.550.458 di bulan maret 2023.⁶

Angka kemiskinan yang tercatat di tahun 2022 relatif masih tinggi, baik dilihat dari kemiskinan yang ada di daerah kota maupun di desa. Diketahui bahwa Desa Temon yang terletak di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan ikut menyumbangkan angka dari persentase kemiskinan dari penduduk yang berada di garis kemiskinan oleh BPS. Pada bulan Maret 2022 sebesar 11,80

⁴ Majid, "Mengentaskan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (2011).

⁵ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 14.

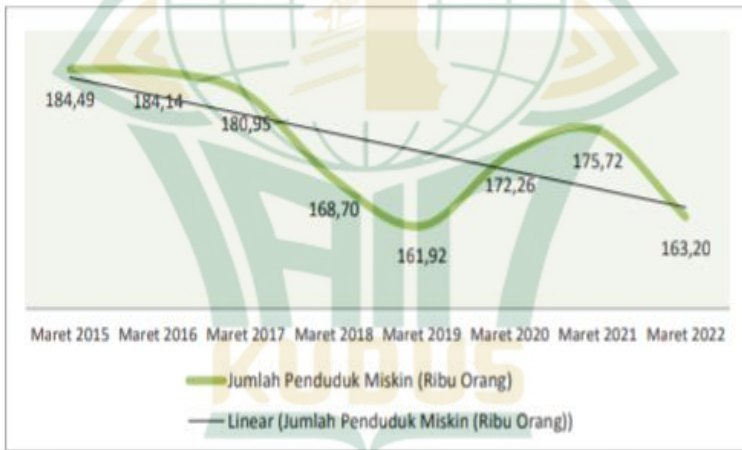
⁶ BPS, *Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Daerah, 1996-2023*, <https://www.bps.go.id/indicator/23/182/1/garis-kemiskinan-rupiah-kapita-bulan-menurut-daerah.html> di akses pada tanggal 9 November 2023 pukul 00.48 WIB.

persen atau sekitar 163,20 ribu orang, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2021 yaitu sebesar 12,74 persen atau sekitar 175,72 ribu orang. Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan pada Maret 2022 sebesar Rp.428.597,- per kapita per bulan, mengalami kenaikan dibanding Maret 2021 sebesar Rp.404.456,- per kapita per bulan.

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Maret 2021 - Maret 2022. Diketahui bahwa persentase penduduk miskin pada periode Maret 2021 ke Maret 2022 menunjukkan penurunan dari 12,74 persen pada Maret 2021 menjadi 11,80 persen atau turun 0,94 persen. Jika dilihat jumlahnya, jumlah penduduk miskin turun dari 175,72 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 163,20 ribu orang pada Maret 2022 (Gambar 1) atau turun sebanyak 12,52 ribu orang.

Grafik 1.1

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan (dalam Ribuan Orang), 2015-2022



Sumber : BPS Kabupaten Grobogan

Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp.428.597,- per kapita per bulan, naik sebesar Rp.24.141,- atau sebesar 5,97 persen dibandingkan Garis Kemiskinan Maret 2021 yaitu sebesar Rp.404.456,- per kapita per bulan.⁷

⁷ BPS Kabupaten Grobogan, *Tingkat Kemiskinan Kabupaten Grobogan Maret 2022*, <https://grobogankab.bps.go.id/pressrelease/2023/09/27/120/tingkat-kemiskinan-kabupaten-grobogan-maret-2022.html> di akses pada tanggal 7 November 2023 Pukul 00.25 WIB.

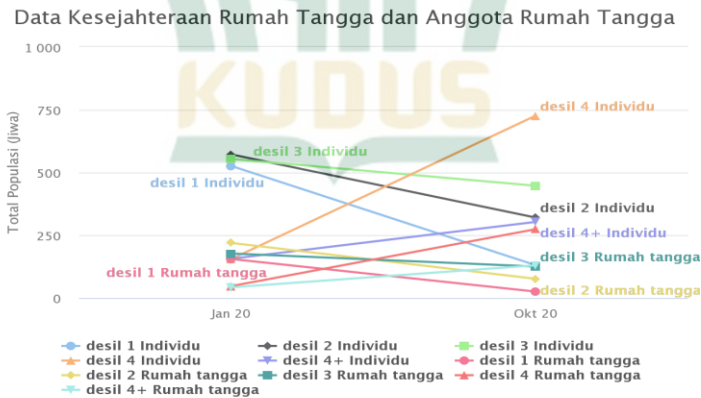
Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan, 2015-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000 orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
2015	184,49	13,68
2016	184,14	13,57
2017	180,95	13,27
2018	168,70	12,31
2019	161,92	11,77
2020	172,26	12,46
2021	175,72	12,74
2022	163,20	11,80

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan

Terdapat data dari DTKS kabupaten Grobogan yang menyatakan angka masyarakat Desa Temon yang berada pada garis kemiskinan berjumlah 2.192 dari jumlah keseluruhan penduduk 5.325. Angka ini didapat per november 2023. Kesejahteraan rumah tangga dan anggota rumah tangga dari Desa Temon menggambarkan kondisi kesejahteraan yang ada di Desa Temon Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

Gambar 1.3
Data Kesejahteraan Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga Desa Temon



Sumber : SIDesa Jawa Tengah

Dengan adanya permasalahan mengenai kemiskinan, Pemerintah menghadirkan program khusus serta stimulus untuk mengatasi kemiskinan yang masih kompleks. Program yang

dijalankan pemerintah adalah program bantuan sosial. Dijalankan oleh Kementerian koordinasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (kemenko PMK) sesuai dari Perpres Nomor 9 tahun 2015. Program ini mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra Sejahtera (Rastra), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).⁸

Program keluarga harapan (PKH) mulai dilaksanakan sejak tahun 2007.⁹ Didasarkan pada keputusan Menteri koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat yang menjadi ketua tim dari koordinasi penanggulangan kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan”. Selain itu, UU Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan merupakan program dengan pemberian bantuan sosial bersyarat untuk keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan.

Penerima manfaat yang sesuai dengan syarat/kriteria akan terdaftar pada data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi Kesejahteraan Sosial sehingga ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Peserta diwajibkan dapat memenuhi syarat dan komitmen berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia berupa pendidikan dan kesehatan.¹⁰

Tujuan dari adanya program ini adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang meningkat, dan memperbaiki perilaku untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Dengan dilaksanakannya program PKH diharapkan akan membawa dampak positif. Pada jangka pendek PKH warga miskin diharapkan dapat menerima manfaat dengan mengurangi beban pengeluaran. Manfaat jangka menengah, penerima PKH akan merubah perilaku dalam mengakses pelayanan kesehatan serta pendidikan tujuannya agar tercipta generasi yang sehat dan

⁸ "Program Bantuan Sosial Untuk Rakyat," Website Kominfo, 19 Desember, 2018, https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/15708/program-bantuan-sosial-untuk-rakyat/0/artikel_gpr.

⁹ Kementerian Sosial RI, “25 Tahun 2016, Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan,” (30 Desember 2016).

¹⁰ Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia* (Bandung: Fokusmedia, 2012), 128.

cerdas. Sedangkan pada jangka panjang, PKH mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial serta diawasi oleh badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas) sebagai upaya dalam pengembangan sistem perlindungan sosial dengan tujuan mensejahterakan warga miskin.¹¹ Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang basisnya pada keluarga miskin, sehingga sasaran utamanya adalah keluarga tidak mampu secara ekonomi. Keluarga tidak mampu ini yang memiliki anggota keluarga (orang tua-ayah, ibu-dan anak) serta anaknya berusia 0 sampai 15 tahun, ibu hamil, dan bertempat tinggal di lokasi terpilih.

Terlaksananya PKH secara baik, didukung juga dengan pendamping PKH yang menjadi pemeran penting dalam suksesnya PKH. Mereka adalah orang-orang yang direkrut serta dikontrak kerjakan tetap oleh Kementerian Sosial dengan tugas pendampingan di wilayah kecamatan.¹² Implementasi pemberdayaan masyarakat miskin serta peran dari pendamping merupakan bagian dari keberhasilan PKH. Pendamping menjadi penyalur informasi dari penerima manfaat dengan pihak lain di wilayah kecamatan dengan program di wilayah kabupaten/kota. Selain itu pendamping juga memiliki tugas dalam memberdayakan masyarakat miskin pada sasaran programnya.¹³

Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera menjadi program yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2017. Program ini dijalankan sesuai Keputusan Menteri Sosial Nomor No.228/PMK.05/2016 yang sebelumnya adalah program Raskin (Beras untuk rakyat miskin).¹⁴ Pembaharuan dari program ini agar program dapat berjalan dengan tepat sasaran kepada keluarga miskin, proses penyaluran yang lebih baik, pemberian kartu serta kualitas beras lebih bermutu. Kelompok penerima manfaat yang mendapatkan Rastra harus memiliki kriteria sebagai berikut: Kondisi dari rumah yang kurang layak,

¹¹ Peraturan Menteri Sosial RI, “1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan,” (08 Januari 2018).

¹² Evi Rahmawati, “Peran Pendamping Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan,” *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 01 no. 2 (2017): 5.

¹³ Sri, Bantuan Sosial di Indonesia, 135.

¹⁴ Bab I huruf B Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera 2018

pondasi/lantai berasal dari kayu ataupun tanah, memiliki motor tetapi difungsikan untuk usaha, memiliki tanggungan/anak. Dengan terpenuhinya kriteria yang disebutkan diatas maka seseorang akan berhak masuk kedalam kategori penerima Rastra.

Program Rastra menjadi implementasi dari instruksi pemerintah mengenai kebijakan beras nasional. Presiden memberikan arahan kepada Menteri dan lembaga pemerintah non kementerian, serta gubernur dan bupati/walikota di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan peningkatan pendapatan pertanian tanda pengembangan ekonomi di desa ketahanan keamanan dan agama dan stabilitas ekonomi nasional. Perum Bulog dipercaya oleh Presiden sesuai instruksinya untuk menyediakan serta menyalurkan beras subsidi kepada kelompok masyarakat dengan penghasilan yang rendah, mengutamakan pengadaan beras dari petani dalam negeri.¹⁵

Tujuan dari disalurkan nya beras bersubsidi kepada masyarakat dengan penghasilan rendah agar beban pengeluaran berkurang serta pemenuhan dari kebutuhan pangan berasnya terpenuhi.¹⁶ Tak hanya itu peningkatan akses masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangannya menjadi salah satu hak dasar yang harus tercapai. Program bantuan sosial beras sejahtera disalurkan kepada kelompok penerima manfaat sebesar 10 Kg setiap bulannya dengan beras kualitas medium.¹⁷

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan yang bentuknya non tunai dari pemerintah diberikan kepada kelompok penerima manfaat, diberikan setiap bulan dengan sistem elektronik berupa Pembelian bahan pangan di pedagang pangan/e-warung yang telah bekerja sama dengan bank. BPNT diberikan kepada KPM dengan nominal Rp.110.000, ditransfer melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) elektronik. Besaran uang yang ada di dalam kartu keluarga sejahtera tidak dapat diambil secara tunai dan hanya dapat dibelanjakan seperti

¹⁵ Angka kelima Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah

¹⁶ TNP2K. Raskin-Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. (Jakarta (ID): Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017).

¹⁷ "Program Bantuan Sosial Untuk Rakyat," Website Kominfo, 19 Desember, 2018, https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/15708/program-bantuan-sosial-untuk-rakyat/0/artikel_gpr.

bahan pangan melalui warung (elektronik warung gotong royong) dan RPK (rumah pangan kita).¹⁸

Kartu keluarga sejahtera elektronik memiliki sistem saving account dan e-Wallet sehingga dapat dibelanjakan dana bantuan sosial tersebut untuk membeli kebutuhan pokok. Jika dana yang digunakan masih tersisa dalam jangka waktu satu bulan maka otomatis dana tersebut disimpan sebagai tabungan yang dapat digunakan di bulan berikutnya.

Bantuan pangan non tunai dalam pelaksanaannya diatur pada Perpres RI No. 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non tunai. Program ini dinyatakan sebagai penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat dengan efisien agar penerimaannya tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi, serta tepat kualitas. Tujuannya untuk mengurangi beban dari pengeluaran kelompok penerima manfaat dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangannya, memberi nutrisi seimbang kepada penerima manfaat. Program ini dapat memberikan lebih banyak pilihan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong pencapaian dari tujuan pembangunan berkelanjutan.¹⁹

Desa Temon memiliki masalah yang kaitannya dengan kesejahteraan, dalam penyaluran program bantuan sosial terdapat penerima bantuan yang tidak tepat serta keterlambatan dalam hal penyaluran bantuan, hal ini diketahui saat melakukan observasi pada tanggal 31 Oktober 2023²⁰. Dari permasalahan tersebut sangat dimungkinkannya adanya penelitian, mengingat dari literatur serta sumber informasi tersedia dan lokasi penelitian yang terjangkau dalam mengumpulkan data, sehingga Desa Temon menjadi studi kasus dalam penelitian.

Sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakatnya, pemerintahan dibantu perangkat desa Temon menyalurkan program bantuan sosial kepada kelompok penerima manfaat yang berasal dari 6 dusun di Desa Temon, yang terdiri dari Dusun Temon, Tangsri, Ketitang, Bogangin, Calebung, dan Ngrigo.

¹⁸ Ahda Sulukin Nisa, "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019), h.48.

¹⁹ Anisa Rahma Dini, "Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung" (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019), h. 3.

²⁰ Observasi awal Desa Temon Kecamatan Brati, 30 Oktober 2023.

Dengan target penerima bantuan sosial berupa PKH, Rastra, serta BPNT kepada masyarakat Desa Temon.

Tabel 1.4

Data perkembangan KPM Desa Temon Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah
1	2021	1.617 KPM
2	2022	1.552 KPM
3	2023	1.402 KPM

Sumber : Data penerima KPM dari kelurahan Desa Temon

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 jumlah KPM yang mendapat bantuan sosial di Desa Temon mencapai 1.617. Hal ini diakibatkan dari adanya pandemi korona yang berdampak pada masyarakat Desa Temon. Tahun 2022 KPM berjumlah 1.552 dan di tahun 2023 berjumlah 1.402, yang artinya mengalami penurunan sebesar 150 KPM.

Melihat adanya latar belakang masalah, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam mengenai **Analisis Efektivitas Program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. (Studi Kasus Kelompok Penerima Manfaat Desa Temon Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan)** yang dampaknya akan meningkatkan kompetensi masyarakat sehingga potensi yang ada dapat meningkatkan kesejahteraan bagi penerima manfaat di Desa Temon..

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah efektivitas program bantuan sosial (PKH, Rastra, dan BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat ditemukan rumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Temon Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan ?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan Rastra dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Temon Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan ?

3. Bagaimana efektivitas penerimaan BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Temon Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan ?
4. Bagaimana program bantuan sosial menurut perspektif ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan yang pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Temon Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Rastra dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Temon Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan
3. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Temon Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan
4. Untuk mengetahui program bantuan sosial menurut perspektif ekonomi syariah dalam mensejahterakan masyarakat

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan, sehingga menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan literatur terkait dengan program bantuan sosial (PKH, Rastra, dan BPNT) dalam mensejahterakan rakyat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan mengenai program bantuan masyarakat untuk rakyat menurut perspektif ekonomi syariah dalam mensejahterakan masyarakat. Serta merupakan karya ilmiah untuk menyelesaikan Strata

b. Bagi IAIN Kudus

Penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang ekonomi. Dapat dijadikan bahan tambahan literatur

bacaan bagi civitas akademika kampus IAIN Kudus, khususnya bagi mahasiswa Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat dan Lembaga Terkait

Sebagai sumber informasi untuk masyarakat bahwa BPNT, PKH, dan Rastra dapat membantu dalam mensejahterakan masyarakat. Serta bagi lembaga terkait dengan program bantuan sosial untuk menjadi referensi dan bahan evaluasi dalam implementasi dari program tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika dalam penelitian yang membahas tentang efektivitas dari program bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Temon Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yang dibahas menurut perspektif ekonomi syariah.

b. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian teori terhadap judul, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian.

c. BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, yaitu jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

d. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

e. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjadi akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.